

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Isu krisis pangan menjadi salah satu tantangan paling mendesak dalam tatanan global saat ini. Permasalahan ini tidak hanya terbatas pada kekurangan pasokan makanan di suatu wilayah, tetapi juga berkaitan erat dengan ketidakstabilan harga pangan, distribusi yang tidak merata, serta dampak perubahan iklim yang semakin memperburuk situasi. Menurut laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO), lebih dari 700 juta orang di dunia mengalami kelaparan kronis pada tahun 2023, sebuah angka yang mencerminkan besarnya skala krisis pangan global (FAO, 2023). Krisis pangan juga dapat memicu konflik sosial, migrasi, dan instabilitas politik, sehingga menempatkannya sebagai isu strategis yang melampaui batas-batas nasional. Lebih lanjut, dalam konteks hubungan internasional, krisis pangan menjadi perhatian utama karena erat kaitannya dengan keamanan manusia, dan stabilitas global. Negara-negara saling bergantung dalam sistem perdagangan pangan internasional, sehingga gangguan pada rantai pasok global dapat berdampak luas terhadap banyak negara, terutama yang sangat bergantung pada impor pangan. Seperti yang dikemukakan oleh Clapp dan Cohen (2009) pada halaman 7 dalam bukunya yang berjudul “*The Global Food Crisis: Governance Challenges and Opportunities*” yang berbunyi demikian:

“Food crisis is now widely recognized as a global public good, requiring coordinated international action to address both immediate needs and long-term challenges.”

Melalui kutipan tersebut menunjukkan bahwa, penyelesaian krisis pangan membutuhkan kerja sama internasional yang erat, baik melalui organisasi internasional seperti *Food and Agriculture Organization (FAO)*, dan *World Food Programme (WFP)*. Organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai penyedia bantuan pangan darurat, tetapi juga sebagai fasilitator dalam pembangunan ketahanan pangan jangka panjang di berbagai negara. Misalnya, *World Food Programme* secara aktif menjalankan program bantuan makanan, nutrisi, dan pembangunan ketahanan pangan, serta bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat sistem pangan nasional, seperti yang dilakukan di beberapa negara. Implementasi bantuan tersebut memungkinkan penanganan krisis pangan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dengan mengedepankan kerja sama multilateral yang sinergis untuk mengatasi kebutuhan mendesak sekaligus membangun kapasitas lokal agar lebih mandiri dalam jangka panjang. Dengan demikian, kolaborasi internasional yang terorganisir dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan krisis pangan global secara efektif.

Problematika mengenai isu krisis pangan hingga kini masih terus menjadi permasalahan bagi negara *Least Development Countries (LDCs)*. Negara dapat dikategorikan menjadi LDCs ketika negara tersebut memiliki hambatan struktural seperti berpenghasilan rendah, rentan terhadap

guncangan ekonomi dan lingkungan hidup, kerawanan pangan akut hingga krisis pangan berkelanjutan, serta sumber daya manusia yang rendah (Harsch, 2010). Dalam isu krisis pangan, maka organisasi internasional menjadi garda terdepan untuk memberikan bantuan agar dapat membantu memulihkan kondisi negara yang dikategorikan dalam *Least Development Countries*. Terhitung hingga saat ini, 44 negara yang termasuk *Least Development Countries* masih mendapatkan distribusi bantuan kemanusiaan termasuk bantuan dalam konteks pangan (UN, 2023). Adapun negara tersebut berasal dari Benua Afrika, Benua Asia, Kepulauan Karibia, dan Kawasan Pasifik. Kemudian, dalam 44 negara tersebut, Haiti merupakan satu - satunya negara di Kepulauan Karibia, yang termasuk kedalam negara dengan kategori *Least Development Countries* (UNCTAD, 2019). Dengan demikian, Haiti merupakan negara satu-satunya di Kepulauan Karibia yang masih mengalami krisis tertinggi.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan salah satu faktor terbesarnya, yaitu situasi krisis pangan ekstrim yang terjadi di Haiti pada tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, Haiti mengalami bencana El Nino, dan ketegangan politik. Bencana tersebut mengakibatkan kurang lebih ratusan ribu jiwa meninggal dunia, dan mengakibatkan kenaikan harga bahan pokok (OCHA, 2024). Selain itu, tepat pada akhir 2019, Haiti masih mengalami ketegangan sosial, dan politik sebagai dampak berkepanjangan dari pengangkatan Jovenel Moise sebagai Presiden Haiti pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2020 tentu Haiti juga

mengalami permasalahan yang sama dengan negara lain pada saat itu, yaitu terjadi wabah COVID – 19, dan badai yang mengakibatkan krisis pangan di Haiti semakin meningkat. Kemudian, pada tahun 2021 terjadi bencana gempa bumi terbesar dari tahun sebelumnya, yaitu dengan kekuatan 7,2 skala Richter (Perel & Halpert, 2022). Selain itu, pada tahun yang sama juga terjadi kasus pembunuhan Presiden Jovenel Moise, yang menyebabkan terjadinya kekosongan politik, ditambah dengan terjadinya wabah kolera hingga tahun 2022. Terakhir, pada tahun 2023 Haiti mengalami kegagalan dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang disebabkan oleh masih terjadinya situasi kekerasan geng ekstrim, yang belum pernah terjadi sebelumnya (Niño, 2023). Dengan demikian, permasalahan yang terjadi mulai tahun 2019 hingga 2023 di Haiti sangat kompleks sehingga mengakibatkan krisis pangan akut.

Krisis pangan yang terjadi di Haiti menjadi salah satu bukti tanggungjawab bagi organisasi internasional seperti *World Food Programme*. Dalam menangani isu krisis pangan di beberapa negara termasuk Haiti, *World Food Programme* melakukan upaya pemulihan dengan memberikan bantuan pembangunan berupa program rencana strategis. Rencana strategis ini merupakan program besar *World Food Programme* kepada negara anggotanya untuk memulihkan krisis pangan yang sedang terjadi (WFP, 2019). Salah satu negara anggota yang diberikan program tersebut adalah Haiti, yaitu *Haiti Country Strategic Plan* yang berisikan rencana dukungan strategis oleh *World Food*

Programme dalam bidang pangan bagi negara yang tergolong *Least Development Countries*. Haiti dalam hal ini diberikan bantuan pembangunan berupa program rencana strategis oleh *World Food Programme* sebagai bentuk upaya pengurangan krisis pangan yang terjadi, sebagaimana untuk mendukung rezim internasional dalam bentuk kerangka pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2, yaitu bebas kelaparan. Program tersebut telah diterapkan oleh *World Food Programme* sejak tahun 2019 di Haiti. Namun, saat program tersebut diterapkan, Haiti juga mengalami beberapa permasalahan seperti yang telah diuraikan. Hal ini dapat dilihat bahwa masalah yang berada pada negara tersebut cukup kompleks, dan akarnya telah berlangsung sejak lama.

Program *Haiti Country Strategic Plan* telah dan sedang diimplementasikan oleh *World Food Programme* selama dua kali dengan jangka waktu 5 tahun, seperti *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023*, dan *Haiti Country Strategic Plan 2024 – 2028*. Menurut data yang diberikan oleh *Global Report on Food Crise* tahun 2023, angka krisis pangan tertinggi di Haiti terjadi pada tahun 2019 hingga 2023, dengan lebih dari 3 juta korban krisis pangan (GRFC, 2023). Dalam hal ini, *World Food Programme* telah mengimplementasikan program besarnya, yaitu *Haiti Country Strategic Plan 2019 – 2023* sebagai upaya untuk mengatasi krisis pangan. Upaya ini dilakukan dengan melaksanakan beberapa program dukungan dibawahnya, seperti pemberian makan siang gratis di

sekolah, dan melakukan beberapa pelatihan kepada masyarakat agar berpotensi menjadi mata pencaharian lain. Namun, hingga saat ini *World Food Programme* membuat *Haiti Country Strategic Plan 2024 – 2028* sebagai perpanjangan upaya untuk mengatasi krisis pangan di Haiti. Dengan demikian, perlu adanya penelitian untuk melihat efektivitas dari implementasi program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* sebagai upaya dalam mengatasi krisis pangan di Haiti, terkhusus pada tahun 2019 – 2023.

Beberapa permasalahan kompleks yang telah diuraikan sebelumnya menjadikan adanya urgensi dalam membahas topik isu krisis pangan. Urgensi menurut penulis, yaitu hingga saat ini krisis pangan masih terjadi akibat kondisi internal negara, dan telah menjadi perhatian organisasi internasional lingkup global maupun regional, serta negara – negara lain. Selain itu, pentingnya upaya oleh organisasi internasional seperti *World Food Programme* dalam menangani krisis pangan bagi negara yang termasuk *Least Development Countries* (Maarif & Madu, 2013:8). Hal ini dibuktikan dengan terhitung mulai dari akhir tahun 2019 hingga 2023, Haiti termasuk dalam krisis pangan dengan tingkat keparahan tertinggi keempat di dunia dengan presentase 48% populasi terdampak (FSIN, 2023). Selain itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah data yang dimiliki oleh *The Integrated Food Security Phase Classification* (IPC), Haiti merupakan satu dari delapan negara tertinggal di Kepulauan Karibia yang mengalami bencana dengan kategori fase 5 IPC. Fase 5

dalam IPC dipahami sebagai fase tertinggi terkait kompleksitas penyebab terjadinya kekurangan pangan, yang mengakibatkan kelaparan, kematian, kesengsaraan, dan tingkat malnutrisi akut yang terlihat jelas sangat memprihatinkan (FSIN, 2023). Dengan demikian, urgensi yang dimiliki dalam penelitian ini berfokus pada meninjau efektivitas implementasi upaya *World Food Programme* melalui program *Haiti Country Strategic Plan* di Haiti, dalam mengatasi krisis pangan pada tahun 2019 hingga 2023.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memiliki alasan ketertarikan untuk mendalami isu mengenai krisis pangan yang terjadi di Haiti. Alasan penulis memilih Haiti sebagai objek penelitian dikarenakan negara tersebut merupakan satu - satunya negara di Kepulauan Karibia, yang termasuk dalam kategori *Least Development Countries* menurut *United Nations*. Selain itu, menurut *Integrated Food Security Phase Classification* pada tahun 2019 hingga 2023, Haiti mencapai pada krisis pangan IPC Phase 5 atau bencana. Klasifikasi ini merupakan fase tertinggi dalam skala ketidakamanan pangan akut, dan terjadi apabila suatu wilayah memiliki sedikitnya 20% rumah tangga yang menghadapi kekurangan pangan ekstrim, dimana sedikitnya 30% anak-anak menderita kekurangan gizi akut, dan dua orang untuk setiap 10.000 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan atau akibat kekurangan gizi, dan penyakit (IPC, 2019). Selanjutnya, topik ini menarik dikarenakan terdapat banyak faktor penyebab meningkatnya krisis pangan yang terjadi dari tahun 2019

hingga 2023. Dimulai dari terjadinya bencana alam, permasalahan politik negara, hingga banyaknya terjadi kekerasan oleh geng yang menyebabkan beberapa distribusi bantuan terhambat. Hal tersebut dapat didukung dengan pernyataan bahwa negara dengan krisis pangan tertinggi pada tahun 2019 hingga 2023 diduduki oleh Haiti, dengan masyarakat terdampak kurang lebih sebesar 4.869.086 jiwa (UN, 2024). Meskipun hingga saat ini krisis pangan di Haiti masih ada, dapat dipahami bahwa Haiti mengalami peningkatan krisis pangan yang signifikan pada tahun 2019 hingga 2023. Selain itu, akibat dari adanya krisis pangan juga menjadikan banyaknya terjadi perpindahan masyarakat ke negara lain atau yang kerap disebut sebagai migrasi, meningkatnya kekerasan oleh geng, dan adanya aksi anti pemerintah. Dengan demikian, program *Haiti Country Strategic Plan* yang diberikan oleh *World Food Programme* menjadi salah satu upaya untuk mencapai keberhasilan kerangka kerja pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2, yaitu bebas kelaparan dengan mengurangi angka krisis pangan di Haiti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah bahwa *World Food Programme* memiliki tujuan untuk mencapai kerangka pembangunan SDGs 2 sebagai rezim internasional. Upaya tersebut telah diimplementasikan melalui programnya berupa *Haiti Country Strategic Plan* sebagai upaya untuk mengurangi angka krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 hingga 2023. Namun, didalam jangka waktu tersebut juga

terjadi beberapa permasalahan negara, yang menyebabkan krisis pangan masih terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana efektivitas rezim internasional melalui implementasi program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 – 2023 ?“

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua unsur yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui implementasi rezim internasional dalam bentuk kerangka pembangunan SDGs 2 melalui program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 - 2023.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menentukan tingkat efektivitas rezim internasional dalam bentuk kerangka pembangunan SDGs 2 melalui implementasi upaya *World Food Programme* melalui program *Haiti Country Strategic Plan* dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 - 2023.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

1. Untuk meningkatkan keberagaman penelitian dalam perkembangan rezim internasional pada Hubungan Internasional.
2. Untuk meningkatkan penelitian sebelumnya mengenai efektivitas rezim internasional SDGs 2 melalui implementasi upaya *World Food Programme* melalui program *Haiti Country Strategic Plan* dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 - 2023.
3. Untuk menambah referensi bagi penelitian selanjutnya terkait upaya *World Food Programme* di negara yang termasuk pada *Least Development Countries* (LDCs).

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan terkait efektivitas rezim internasional berupa kerangka pembangunan SDGs 2 melalui program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 - 2023.
2. Untuk memberikan rekomendasi mengenai upaya dalam mengatasi krisis pangan di Haiti oleh organisasi internasional.
3. Untuk meningkatkan upaya oleh *World Food Programme* di negara yang membutuhkan, terkhusus negara yang termasuk

pada kategori *Least Development Countries* (LDCs).

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Tinjauan Literatur

Penelitian ini menggunakan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan berdasarkan topik pembahasan untuk mencari *research gap*. Penelitian pertama yang dapat dikomparasikan adalah penelitian yang dibuat oleh Yulia Rimapradesi, Istiqomah, dan Siti Rabbani Hakim yang berjudul “*The Role of The World Food Programme (WFP) in Addressing The Food Crisis in Haiti (2019 – 2021)*”. Penelitian ini berfokus pada peran *World Food Programme* dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi di Haiti pada tahun 2019 – 2021. Dalam laporan tahunan *World Food Programme*, Haiti merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan pangan tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan lebih dari separuh penduduknya menderita kekurangan gizi kronis dan 22% penderitanya adalah anak – anak (Rimapradesi et al., 2024:4). Lebih lanjut, *Analysys Integrated Food Security Phase Classification* (IPC) menyebutkan bahwa terdapat 2,6 juta orang membutuhkan bantuan pangan darurat pada periode Maret – Juni 2019 (IPC, 2019). Namun, puncak krisis pangan terjadi pada Agustus 2020 sampai Juni 2021. Terdapat sejumlah 4,4 juta jiwa masyarakat di Haiti yang menderita kerawanan pangan akut, dengan klasifikasi 1.156.915 juta jiwa pada tahap 4 IPC, yang dimana ini

dianggap darurat. Tingginya tingkat kerawanan pangan yang telah mencapai tahap darurat di Haiti merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Melihat situasi ini, maka *World Food Programme* sebagai organisasi internasional memiliki tanggungjawab untuk memulihkan kondisi pangan di negara Haiti. *World Food Programme* sebagai organisasi internasional melakukan beberapa upaya untuk memulihkan kondisi Haiti, yaitu mendukung Pemerintah Haiti untuk menerapkan *Zero Hunger* dengan mendistribusikan makanan darurat, logistik, dan bantuan telekomunikasi (Rimapradesi et al., 2024:8). Bantuan tersebut termasuk kedalam *Country Strategic Plan* yang dimiliki oleh *World Food Programme*. *Country Strategic Plan* dapat didefinisikan sebagai program tahunan *World Food Programme* yang terdiri dari beberapa kegiatan yang diharapkan dapat mencapai target rencana tahunan selama tiga tahun terakhir. Rimapradesi tidak menggunakan teori khusus dalam penelitian ini, namun hanya menggunakan metode penelitian kualitatif eksplanatif, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *World Food Programme* berperan sebagai instrumen bagi pemerintah Haiti untuk bekerja sama menangani krisis pangan, dan berperan sebagai aktor dalam menangani krisis pangan di Haiti melalui program *Country Strategic Plan* (CSP).

Penelitian kedua milik Guy Robert Pierre yang berjudul “***Poverty in Haiti***”. Penelitian ini menjelaskan masalah kemiskinan

yang disebabkan oleh krisis pangan adalah masalah terbesar yang harus dihadapi oleh Haiti. Keadaan kemiskinan yang ada di Haiti sangat menyiksa sehingga mengakibatkan sebagian besar penduduk Haiti merasa hampir mustahil untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, pakaian, terutama pasokan makanan (Pierre, 2020). Selanjutnya, penelitian ini melihat penyebab kemiskinan di Haiti secara budaya, struktural, serta upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan termasuk dalam menstabilkan pemerintahan Haiti. Mengutip program pembangunan PBB, Oxfam mengingatkan bahaya dari mengabaikan hierarki kemiskinan yang mengakibatkan kerawanan pangan, yang menuntut identifikasi dan inklusi semua sektor masyarakat (Oxfam, 2020). Bantuan internasional oleh organisasi internasional dianggap sebagai komponen penting dalam membantu memulihkan kondisi di Haiti ini. Namun, disisi lain organisasi internasional juga mengalami tekanan yang besar untuk menunjukkan hasil atas bantuan terutama dana yang telah diinvestasikan di Haiti. Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teori kritis milik Jurgen Habermas, yang menekankan adanya ketidakadilan struktural, dan kekuasaan dalam mempengaruhi kemiskinan hingga kerawanan pangan. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa terdapat upaya pengentasan permasalahan di Haiti hanya seperti, meningkatkan pertumbuhan

ekonomi melalui sumber daya alam yang dimiliki, menciptakan program ketenagakerjaan, meningkatkan lahan pangan, dan pemerintah harus sadar diri untuk konsisten memperbaiki situasi yang diimplementasikan melalui program *Country Strategic Outline* oleh *World Food Programme*. Dengan demikian, upaya tersebut dapat dilakukan dengan tujuan membenahi situasi internal di Haiti.

Berikutnya, terdapat penelitian yang berjudul “**Peran CELAC dalam Menangani Krisis Pangan di Haiti**” oleh Eka Safitri Minabari, dan Farayani Hamin. Penelitian ini menjelaskan bahwa krisis kelaparan di Haiti disebabkan oleh adanya perubahan situasi iklim sehingga tidak mampu memproduksi atau memanen hasil sumber daya alam mereka sendiri. Seperti yang terjadi di tahun 2011, dimana Haiti melakukan kegiatan impor makanan dengan dana lebih dari US \$800 juta (Minabari & Hamin, 2019:6). Selanjutnya, Haiti mengalami bencana alam *El Nino* dari tahun 2015 hingga tahun 2016. Hal ini menyebabkan masyarakat Haiti mengalami awal kemiskinan dan kehilangan sumber bahan pangan mereka. Melihat situasi ini, organisasi regional yaitu *Community of Latin American and Caribbean States* (CELAC) melakukan bantuan kemanusiaan untuk menangani permasalahan tersebut. CELAC berkolaborasi dengan organisasi badan khusus dari *United Nations* yaitu, *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *World Food Programme* (WFP) untuk menerapkan program *zero hunger*.

Program yang dilakukan oleh kedua organisasi ini merupakan turunan dari program *Sustainable Development Goals*, yang diciptakan oleh *United Nations*. Program yang digagas ini memiliki tujuan untuk mengentaskan kelaparan, dan mencapai ketahanan pangan (Minabari & Hamin, 2019:10). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan konsep peran organisasi internasional, yang menekankan pada prinsip organisasi internasional memiliki wewenang untuk memberikan kerangka Kerjasama untuk mengatasi permasalahan di negara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh organisasi regional, dan internasional, seperti melakukan forum seperti KTT CELAC yang membahas mengenai rencana ketahanan pangan sebagai bentuk dukungan adanya SDGS, dan melakukan perencanaan terkait kebijakan publik yang dapat diterapkan untuk keamanan dan ketahanan pangan. Dengan demikian, kerjasama antara CELAC, FAO, dan WFP merupakan salah satu bentuk upaya untuk memulihkan kondisi kelaparan, dengan melakukan beberapa program untuk mencapai keamanan dan ketahanan pangan.

Terakhir, penelitian yang dibuat oleh Enjelina Pabarri, Ayu Kartika Julianingsih Tas'an, yang berjudul **“Strategi World Food Programme (WFP) dalam Mengatasi Kasus Malnutrisi di Haiti”**. Penelitian ini melihat bahwasanya malnutrisi dan kerawanan pangan menjadi satu kesatuan permasalahan yang mendesak. Hal ini

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidakstabilan situasi pemerintah Haiti, COVID – 19, gempa bumi, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng, dan perubahan iklim yang terjadi di Haiti. Situasi ini menjadi darurat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2022, yang menciptakan kenaikan angka krisis pangan di Haiti semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan konsep perubahan milik *United Nations Development Assistance Framework* (UNDAF) dengan menggunakan empat strategi utama, yaitu fokus pada kelompok rentan, analisis perubahan, identifikasi resiko, dan identifikasi mitra serta aktor terkait. Kemudian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan malnutrisi dan kerawanan pangan akut sudah menjadi permasalahan darurat untuk diatasi. *World Food Programme* dalam hal ini menjadi aktor yang berperan untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi dengan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat terdampak, memberikan bantuan melalui pemberian jaring pengaman nutrisi, dan meningkatkan produksi pertanian lokal. Dengan demikian, *World Food Programme* melakukan perannya secara intensif untuk memberikan bantuan, dan masyarakat dapat menerima manfaat dari bantuan tersebut.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa perbandingan penelitian sebelumnya terdapat penjelasan yang cenderung berfokus pada peran yang dilakukan oleh organisasi internasional, seperti

World Food Programme untuk mengatasi krisis pangan yang struktural di Haiti. Hal ini selaras dengan kerangka pembangunan SDGs 2, yaitu *zero hunger* dengan melakukan beberapa upaya termasuk program *Country Strategic Plan*. Kemudian, terdapat beberapa faktor penyebab yang berasal dari internal, sehingga membuat Haiti masih terjebak dalam krisis pangan hingga saat ini. Selain itu penelitian yang secara khusus mengkaji hasil implementasi dari program *Country Strategic Plan* yang diimplementasikan di Haiti oleh *World Food Programme* masih terbatas, dan umumnya menggunakan konsep peran organisasi internasional. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan perspektif berbeda dengan mengadopsi teori efektivitas rezim internasional oleh Arild Underdal untuk menganalisis tingkat efektivitas dari hasil implementasi program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme*, sebagaimana untuk mencapai keberhasilan rezim internasional dalam bentuk kerangka pembangunan, yaitu SDGs nomor 2.

1.5.2. Teori Efektivitas Rezim Internasional

Dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah tentu diperlukan sebuah dasar atau pondasi untuk menjelaskan sebuah fenomena. Teori atau konsep dalam hal ini menjadi sebuah pondasi untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah diuraikan. Menurut Hoy dan Miskel (dalam 17 Sugiyono, 2010:55) teori dapat dijelaskan

sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan, dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Lebih lanjut, sebuah penelitian dikatakan berhasil jika terdapat relevansi antara penggunaan teori dengan bukti - bukti yang logis. Disisi lain, penelitian ini akan menjelaskan tingkat efektivitas yang dihasilkan dari implementasi *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 – 2023.

Rezim internasional dalam hal ini dapat dipahami sebagai seperangkat aturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku aktor - aktor internasional dalam suatu bidang tertentu, dengan tujuan untuk mengatasi masalah kolektif yang ada (Underdal, 2002:4). Pada penelitian ini, program *Haiti Country Strategic Plan* merupakan bentuk konkrit dari implementasi rezim internasional dalam bentuk kerangka pembangunan SDGs nomor 2, dimana berbagai inisiatif dijalankan untuk mengurangi angka kelaparan, memperkuat sistem pangan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi rezim internasional seperti SDGs sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, organisasi internasional, masyarakat sipil, hingga sektor swasta, serta adanya koordinasi yang efektif dan *monitoring* berkelanjutan untuk memastikan tercapainya target yang telah

ditetapkan. Dengan demikian, rezim internasional tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga mendorong aksi kolektif yang terukur, dan terintegrasi dalam upaya mengatasi tantangan global seperti krisis pangan.

Kemudian, gagasan dari teori efektivitas rezim internasional dirasa cocok untuk menjelaskan aspek independen, dependen, dan intervening sebagai penentu tingkat efektivitas implementasi program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 – 2023. Penelitian ini dirasa cocok menggunakan teori tersebut dikarenakan program *Haiti Country Strategic Plan* termasuk pada implementasi dari rezim internasional dalam bentuk kerangka pembangunan SDGs 2, yaitu bebas kelaparan dengan tujuan untuk mengatasi krisis pangan global, yang kemudian dinilai tingkat efektivitasnya melalui teori tersebut. Dalam menilai tingkat efektivitas diperlukan menjawab aspek penting yang tercantum variabel dependen, independen, dan intervening. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori efektivitas rezim internasional dari Arild Underdal.

Teori efektivitas rezim internasional oleh Arild Underdal dapat dilihat dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence*” (2002). Pada karyanya tersebut, teori rezim internasional dijelaskan pada

bagian 1, yang berjudul “*One Question, Two Answers*”. Teori ini berangkat dari pertanyaan mengapa implementasi aturan internasional tidak selamanya berjalan dengan efektif, dan terkadang mengalami kegagalan. Menurut Underdal, suatu organisasi atau rezim dapat dianggap efektif bilamana berhasil melakukan fungsinya atau memecahkan permasalahan yang dihadapi, khususnya permasalahan yang memotivasi berdirinya organisasi tersebut (Underdal, 2002:2). Selain itu, Underdal juga menyatakan bahwa rezim internasional dapat dikatakan secara efektif apabila tujuan utama terbentuknya rezim tersebut dapat tercapai, dan negara anggota rezim internasional dapat bekerjasama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Implementasi tersebut dapat dilihat dari aksi para aktor yang terikat dengan rezim tersebut, sehingga semakin baik sebuah rezim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut maka akan semakin efektif pula rezim tersebut. Lebih lanjut, dalam menentukan tingkat efektivitas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan kegagalan dari implementasi rezim internasional (Underdal, 2002:2). Adapun tiga alat yang digunakan untuk menganalisa efektivitas rezim menurut Underdal, yaitu variabel dependen, variabel intervening, dan variabel independen. Pada masing – masing variabel memiliki penjelasan fungsi tersendiri, yang dijelaskan sebagai berikut:

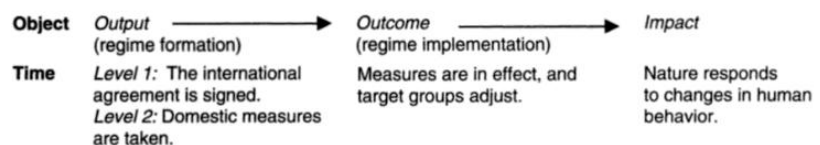
1. Variabel Dependen

Variabel ini menjelaskan unsur – unsur utama yang diperlukan untuk mengukur efektivitas suatu rezim internasional. Selain itu, variabel ini menjawab tiga pertanyaan, yaitu : (1) Obyek apa yang sebenarnya akan dievaluasi ? (2) Standar apa yang digunakan untuk mengevaluasi objek tersebut ? (3) Bagaimana kita dapat membandingkan objek tersebut dengan standar yang telah ditentukan ?. Melalui pertanyaan tersebut, teori ini dapat menjawab dengan beberapa penjelasan. Pertama, kita harus menentukan apakah kita hanya tertarik pada dampak pengaturan rezim itu sendiri atau juga pada biaya yang dikeluarkan, dan dampak positif yang dihasilkan untuk membangun dan mempertahankan. Kedua, tentu harus ada perbedaan antara hasil formal dari proses pengambilan keputusan atau pembentukan aturan (norma, prinsip, dan aturan yang membentuk aturan itu sendiri) dengan konsekuensi dari penerapan dan penyesuaian terhadap aturan tersebut. Lebih lanjut, setelah adanya pembentukan rezim maka tentu terdapat perubahan perilaku dan dampak lingkungan yang sebenarnya hanya dapat ditentukan di kemudian hari. Pada masa penyesuaian ini, maka target implementasi regulasi seperti masyarakat sipil dapat kita

lihat respon atas adanya rezim tersebut apakah dipatuhi atau tidak dipatuhi secara terang – terangan. Kepatuhan yang sempurna terhadap rezim yang kuat saja tidak cukup untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan dalam hal dampak biofisik (Underdal, 2002:6). Secara umum, efektivitas sebuah rezim tertentu (E) dapat dilihat sebagai fungsi dari keketatan dan inklusifnya ketentuan – ketentuannya (S), tingkat kepatuhan dari para anggotanya (C), dan efek samping yang dihasilkannya (B), sehingga dihasilkan rumus

$$E = f(S,C) + B.$$

Unsur yang dimiliki oleh variabel dependen sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact* sebagai langkah yang berbeda dalam rantai peristiwa sebab – akibat, dimana satu langkah berfungsi untuk menganalisis langkah – langkah selanjutnya. Hal ini dapat diperjelas dengan struktur sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Variabel Dependen

Sumber: Underdal, 2002:7

Merujuk pada gambar 1.1, dapat diketahui bahwa variabel dependen dibagi menjadi tiga, yaitu *output*, *outcomes*, dan *impacts*. Dalam unsur *output* atau *regime formation* merupakan seperangkat aturan dan regulasi baru, yang dapat menciptakan *outcomes* atau *regime implementation* sebagai bentuk implementasi seperangkat aturan atau regulasi baru tersebut. Lebih lanjut, unsur *impacts* merupakan hasil atau dampak dari respon masyarakat, yang mengubah perilaku kepatuhan masyarakat itu sendiri, serta sebuah rezim dapat dinilai berdasarkan kriteria seperti keketatan aturan dan regulasinya, sejauh mana sistem kegiatan yang ditargetkan menjadi inklusif, dan tingkat kolaborasi yang terbentuk (Underdal, 2002:7).

Pada ketiga unsur masing - masing tersebut, dapat dijelaskan secara rinci. Pertama. *Output* merupakan tahap dimana rezim internasional dapat disepakati dan ditetapkan kedalam regulasi domestik negara anggota, sehingga aturan domestik negara anggota merupakan hasil dari implementasi dan penyesuaian aturan serta norma dalam rezim internasional. *Output* ini dapat berupa program, perjanjian, deklarasi, kebijakan, dan konvensi internasional, yang terbagi menjadi dua level (Underdal, 2002:8). Level satu dipahami sebagai tingkat tujuan dan nilai yang dibawa oleh rezim internasional telah

disepakati atau ditandatangani oleh negara yang terlibat. Selanjutnya, pada level dua dapat dipahami sebagai tingkat kebijakan serta peraturan domestik suatu negara telah disesuaikan dengan standar aturan serta norma, yang berlaku dalam rezim internasional tersebut. Kedua, *outcomes* rezim internasional dapat dipahami sebagai bentuk dari adanya perubahan tindakan negara yang disebabkan oleh adanya aturan didalam rezim internasional. Ketika suatu negara telah menyepakati dan menandatangani sebuah rezim internasional, dan kemudian terdapat tindakan atau perilaku negara yang diubah dengan tujuan untuk menyesuaikan regulasi yang telah tertuang dalam rezim tersebut, maka dapat dikatakan *outcomes* yang dihasilkan bernilai positif (Underdal, 2002:8). Terakhir, *impacts* dalam hal ini dapat terlihat jika kebijakan domestik yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang telah tertuang dalam rezim internasional berjalan dengan baik, dan memberikan dampak yang positif, serta tujuan dari rezim internasional dapat tercapai. Melalui aspek ini, semakin mudah untuk dicapai, dan membuahkan hasil tujuan dari rezim internasional tersebut, maka semakin efektif pula rezim internasional tersebut.

2. Variabel Intervening

Variabel intervening menurut Underdal dapat dipahami sebagai aspek fokus penentuan skala tingkat kolaborasi dari sebuah rezim internasional, yang ditentukan oleh enam tingkatan skala sebagai berikut :

Skala 0 : *“Joint deliberation but no joint action”*

Para anggota bermusyawarah, namun tidak ada aksi didalam kesepakatan tersebut

Skala 1 : *“Coordination of action on the basis of tacit understanding.”*

Negara anggota yang mematuhi rezim internasional melakukan koordinasi, serta tindakan atas dasar pemahaman secara tertutup

Skala 2 : *“Coordination of action on the basis of explicitly formulated rules or standards but with implementation fully in the hands of national governments. No centralized appraisal of effectiveness of measures is undertaken”*

Negara anggota yang mematuhi rezim internasional berkoordinasi, serta bertindak sesuai aturan dan standar yang telah disepakati dalam rezim internasional tersebut, dengan implementasi

sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional dan tidak ada penilaian secara terpusat.

Skala 3 : *“Same as level 2 but including centralized appraisal.”*

Negara anggota yang mematuhi rezim internasional berkoordinasi, serta bertindak sesuai aturan dan standar yang telah disepakati dalam rezim internasional tersebut, dengan implementasi sepenuhnya berada di tangan pemerintah nasional dan ada penilaian secara terpusat.

Skala 4 : *“Coordinated planning combined with national implementation only. Includes centralized appraisal of effectiveness.”*

Negara anggota rezim internasional berada dalam perencanaan terkoordinasi, implementasi, dan penilaian secara terpusat.

Skala 5 : *“Coordination through fully integrated planning and implementation, with centralized appraisal of effectiveness.”*

Negara anggota yang mematuhi rezim internasional melakukan koordinasi melalui perencanaan, dan pelaksanaan dengan implementasi yang terintegrasi

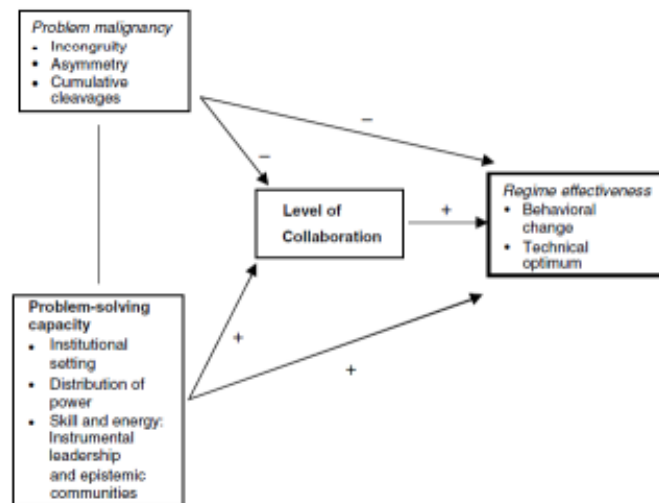
secara penuh diikuti dengan efektivitas secara terpusat.

3. Variabel Independen

Menurut Underdal, variabel independen digunakan untuk menjawab permasalahan mengapa dalam implikasi rezim internasional terkadang mengalami keberhasilan, dan kegagalan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya dua aspek dari variabel independen, yaitu *type of problems* atau karakteristik permasalahan, dan *problem solving capacity* atau kapasitas dalam pemecahan masalah. *Type of problems* dibagi kembali menjadi dua, yaitu *malign* dan *benign*. Karakteristik *malign* memiliki aspek *incongruity*, *asymmetry*, dan *cumulative cleavages*. Karakteristik ini cenderung memiliki kerumitan masalah yang lebih tinggi, yang dikarenakan kompleksitas permasalahan yang sulit diatasi, dan jumlah pihak yang terlibat cukup banyak (Underdal, 2002: 10). Disisi lain, karakteristik *benign* juga memiliki aspek *coordination*, *symmetry*, dan *cross cutting cleavages*. Hal ini dapat dipahami bahwa karakteristik ini cenderung kepada permasalahan yang relatif mudah untuk diatasi, jumlah keterlibatan aktor yang sedikit, dan potensi konflik berkelanjutan yang rendah (Underdal, 2002: 10).

Selanjutnya, aspek yang diperlukan adalah mengenai *problem solving capacity* atau kapasitas pemecahan sebuah permasalahan. Aspek ini dapat dipahami sebagai kepercayaan, bahwa jika suatu permasalahan dapat ditangani secara efektif apabila didukung oleh kehadiran lembaga atau sistem yang memiliki kekuatan lebih besar, dan memiliki keterampilan yang baik, serta energi untuk menyelesaikan permasalahan (Underdal, 2002:11). Adapun tiga indikator yang digunakan sebagai penentu kapasitas penyelesaian masalah, yaitu *institutional setting*, *distribution of power*, dan *skill and energy*. Pertama, *institutional setting* atau pengaturan lembaga mengacu pada hubungan antara hak dan aturan, yang menjelaskan mengenai kegiatan sosial, peran serta panduan berkomunikasi, dan adanya aturan rezim internasional untuk mengikat suatu negara dalam mematuhi (Underdal, 2002:11). Aspek ini memiliki dua fungsi, yaitu *institutions as arenas* yang dipahami bahwa institusi dianggap sebagai akses aturan, keputusan aturan, dan aturan prosedur yang mampu mengatur budaya suatu negara, serta *organization as actors* yang juga dipahami bahwa organisasi merupakan aktor utama dalam menjalankan sebuah rezim internasional. Kedua, *distribution of power* dipahami sebagai kekuatan rezim internasional yang dapat di distribusikan

kepada negara berkonflik (Underdal, 2002:11). Aspek ini juga dibagi menjadi dua, yaitu *benevolent hegemon* dan *coersive hegemon*. *Benevolent hegemon* dapat dipahami sebagai aktor yang bersedia untuk menangani masalah serta memberikan bantuan yang berasal dari sumber daya miliknya, sedangkan *coersive hegemon* dipahami sebagai aktor yang menggunakan kekuatan rezim internasional untuk memaksa, mengontrol, serta menguasai pihak lain untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Terakhir, *skill and energy* dipahami sebagai keterampilan dan energi lembaga atau organisasi internasional untuk menyelesaikan sebuah permasalahan (Underdal, 2002:11). Semakin baik keterampilan dan energi yang dikeluarkan, maka efektivitas rezim internasional akan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat melalui *instrumental leadership* atau keterlibatan kinerja para aktor, seperti tenaga ahli organisasi antar pemerintah, perwakilan kelompok, delegasi nasional serta organisasi transnasional dalam rezim internasional.



Gambar 1.2 Core Model Efektivitas Rezim oleh Underdal

Sumber: Trisnawati & Perbawani, 2024: 280

Merujuk pada gambar 1.2, dapat dilihat bahwa *independent variable* yang digunakan dalam aspek *type of problems* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *problem malignancy*. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan di Haiti merupakan permasalahan yang cukup rumit, berpotensi konflik berkelanjutan yang tinggi, dan jumlah keterlibatan aktor yang banyak. Selanjutnya, *problem solving capacity* atau kapasitas pemecahan permasalahan di Haiti dapat diuraikan dengan beberapa aspek seperti *institutional setting*, *distribution of power*, dan *skill and energy*. Kemudian, *variable intervening* dilihat sebagai *level of collaboration*, sebagaimana teori ini memiliki enam skala utama untuk menentukan tingkatan keberjalanan

implementasi sebuah rezim internasional. Terakhir, variabel dependen dapat dilihat sebagai *behavioral change* yang dapat dinilai dari *outcome* dengan adanya perubahan perilaku, dan *technical optimum* yang dapat dinilai dari *output* dengan adanya kondisi tercapai atau tidaknya sifat ideal dari sebuah pelaksanaan rezim internasional, dan apabila kedua instrumen tersebut berjalan dengan baik maka akan menghasilkan *impacts* yang lebih luas (Underdal, 2002:5). Dengan demikian, aspek *variabel dependen*, *independen*, dan *intervening* dalam gambar tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konsep

1.6.1.1. Efektivitas Rezim Internasional

Menurut Arild Underdal, efektivitas rezim internasional didefinisikan, bahwa suatu rezim dapat dianggap efektif dengan sejauh mana rezim tersebut dapat berhasil menjalankan serangkaian fungsi tertentu atau memecahkan masalah yang memotivasi pembentukannya (Underdal, 2002:4).

1.6.1.2. Rezim Internasional

Menurut *Arild Underdal*, rezim internasional didefinisikan sebagai seperangkat aturan, norma, dan prosedur yang mengatur perilaku aktor-aktor internasional dalam suatu bidang tertentu, dengan tujuan untuk mengatasi masalah kolektif yang ada (Underdal, 2002:4).

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Efektivitas

Penelitian ini memfokuskan efektivitas implementasi program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 – 2023. Dalam hal ini, *World Food Programme* merancang dan mengesahkan *Haiti Country Strategic Plan*, sebagai upaya pengurangan angka krisis pangan. Perlu diketahui, bahwa *Haiti Country Strategic Plan* merupakan program yang berbentuk rencana strategis untuk mendukung pengentasan kelaparan, dan pembangunan yang berkelanjutan melalui program dukungan dibawahnya. Namun, pada jangka waktu tersebut, Haiti masih mengalami beberapa permasalahan yang ekstrim. Hal tersebut menyebabkan angka krisis pangan di Haiti terus meningkat, hingga mencapai krisis pangan fase 5. Konsep efektivitas dalam hal ini dapat digunakan untuk mengevaluasi

bagaimana rencana ini dapat mencapai tujuannya, yaitu mengatasi krisis pangan yang ekstrim di Haiti. Dengan demikian, adanya program *Haiti Country Strategic Plan* dapat ditinjau efektivitasnya untuk mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 – 2023.

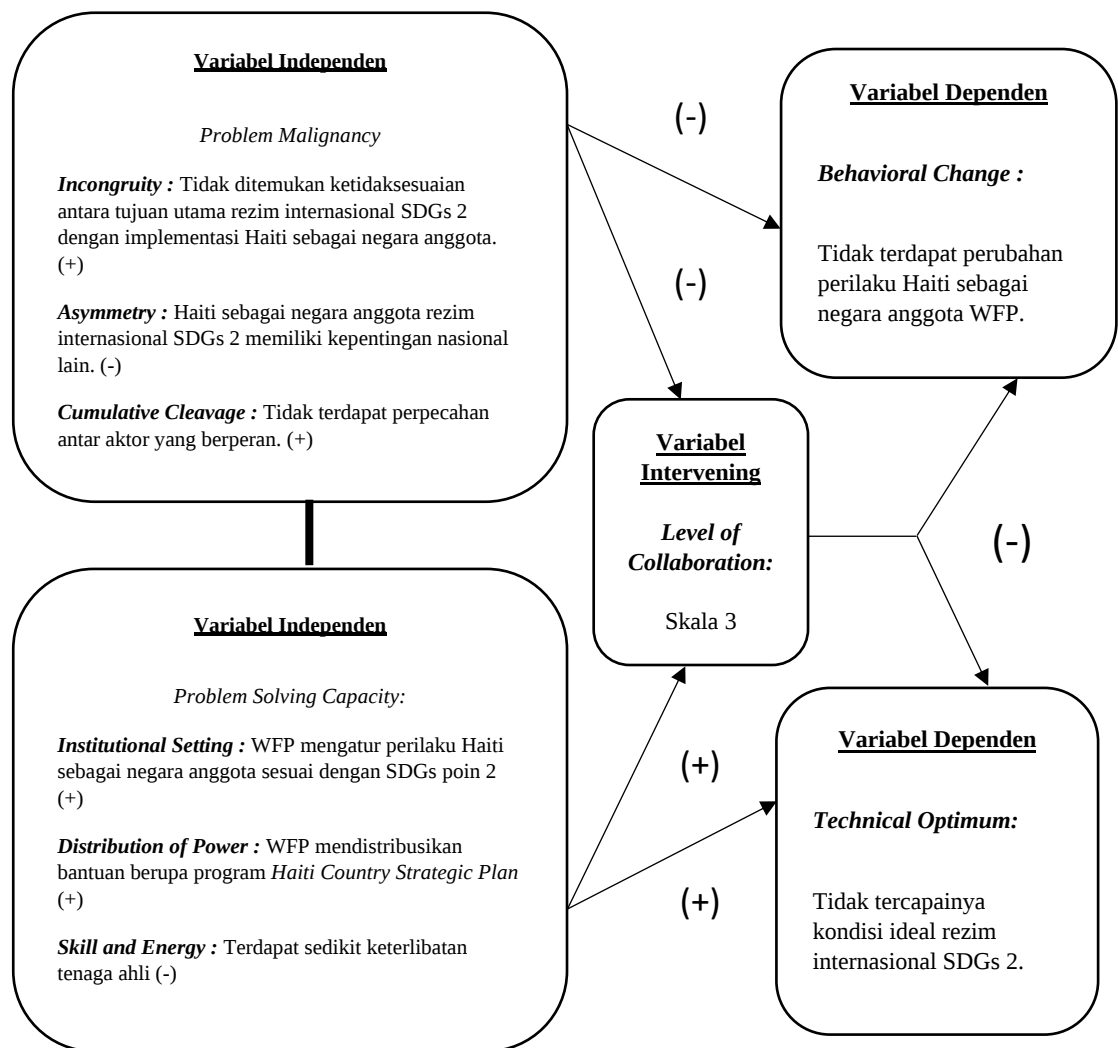
1.6.2.2. Rezim Internasional

Pada penelitian ini, kerangka pembangunan SDGs nomor 2 yang bertujuan untuk masyarakat terbebas dari kelaparan merupakan bentuk dari rezim internasional. Rezim internasional ini berfungsi untuk mengatur tingkah laku dari para aktor internasional, seperti organisasi internasional. Dalam penelitian ini, program *Haiti Country Strategic Plan* merupakan bentuk dari implementasi rezim internasional, yang dilakukan oleh para aktor internasional. Aktor internasional yang berperan dalam mengimplementasikan program ini adalah *World Food Programme*, yang merupakan organisasi internasional yang bertanggungjawab untuk mengatasi krisis pangan dunia. Implementasi dari rezim ini di Haiti melalui berbagai program yang difokuskan pada distribusi bantuan pangan darurat, penguatan kapasitas produksi pangan lokal, serta dukungan terhadap kebijakan nasional yang berorientasi pada pengurangan kelaparan dan malnutrisi. Dengan demikian, rezim internasional yaitu

SDGs 2 berfungsi sebagai kerangka kerja pembangunan yang mengarahkan dan mengkoordinasikan upaya global untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Melalui implementasi program *Haiti Country Strategic Plan*, SDGs 2 tidak hanya menjadi target normatif, tetapi juga menjadi instrumen praktis yang mengarahkan tindakan kolektif untuk mengatasi tantangan pangan di Haiti secara sistematis dan berkelanjutan.

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini memiliki argumen bahwa rezim internasional dalam bentuk kerangka pembangunan SDGs 2 melalui implementasi program *Haiti Country Strategic Plan* kurang efektif untuk mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 - 2023. Hal tersebut dipengaruhi oleh variabel independen, variabel dependen, dan variabel intervening



Gambar 1. 3 Argumen Penelitian

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025

1.8. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pedoman dalam menguji hipotesis dan teori. Mengutip dari pernyataan John W. Cresswell (dalam Bakry, 2016:14), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Hal ini juga berkaitan dengan pernyataan John W. Cresswell, bahwa penggunaan penelitian kualitatif memerlukan sebuah pemahaman, dan penguasaan secara meluas dan spesifik pada tahapan, teknik, dan langkah - langkah penelitian serta analisis data (Cresswell, 2012:16). Berdasarkan perspektif yang telah ada, maka penelitian kualitatif dapat menjadi acuan peneliti untuk melakukan sebuah penelitian berdasarkan berbagai perspektif dan informasi melalui subjek penelitian. Perspektif maupun informasi yang menjadi sumber penelitian akan diperoleh pada situasi yang alami, berdasarkan fenomena atau isu yang diteliti tanpa rancangan yang baku. Oleh karena itu, penggunaan perspektif dan mendalami informasi yang didapatkan, nantinya akan menjadi sumber data dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, metode penelitian kualitatif juga melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, dan peneliti

kemudian memberikan interpretasi mengenai makna dari data yang telah diperoleh (Bakry, 2016). Secara sederhana, maka penelitian kualitatif dapat dimaknai untuk membantu dalam memahami dunia sosial tempat kita hidup, dan mengapa segala sesuatunya dapat terjadi seperti itu. Hal tersebut juga berkaitan dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif lebih berupa kata - kata (words), gambar - gambar atau objek, dan bukan angka - angka (Bakry, 2016:18). Oleh karena itu, alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan argumen, data, dan informasi yang akan disajikan dapat dianalisis lebih mendalam dan kompleks. Selain itu, penelitian ini dapat dinarasikan dengan baik melalui proses deskripsi mengenai argumen, data, dan informasi yang diolah. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menyajikan pemahaman dan mengungkapkan efektivitas implementasi rezim internasional berupa kerangka pembangunan SDGs 2 melalui program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 – 2023 melalui objektivitas data, dan fakta yang ada pada informasi.

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dalam menjawab rumusan masalah yang diawali dengan ‘bagaimana’. Menurut Sugiyono (2017:29), penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan

untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri, dan mencari hubungan dengan variabel lain. Melalui definisi tersebut, maka penelitian ini cocok untuk digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas, dan komprehensif mengenai berbagai variabel yang terlibat. Lebih lanjut, dengan tipe penelitian ini dapat menggunakan data melalui laporan resmi, dokumentasi, dan sumber kredibel lainnya untuk menjelaskan kondisi nyata di lapangan tanpa melakukan manipulasi variabel. Dengan demikian, variabel yang terdapat pada teori ini akan dianalisis untuk menemukan adanya keterkaitan antar variabel guna menilai efektivitas implementasi rezim internasional berupa kerangka pembangunan SDGs 2 melalui program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 – 2023.

1.8.2. Situs Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan situs penelitian sebagai sumber data dalam menjawab rumusan masalah. Secara umum, situs penelitian diartikan sebagai suatu tempat di mana peneliti memahami keadaan sebenarnya dari sasaran penelitian guna memperoleh maupun menyatukan data

atau informasi yang diperlukan dalam penelitian (Nasution, 2003:43). Perlu diketahui bahwa penulis menggunakan data sekunder dengan menggunakan literatur. Pengambilan data sekunder sudah dilakukan melalui data yang ada pada jurnal, buku, laporan resmi, dan media berita. Oleh karena itu, penulis menggunakan jurnal milik *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *Journal Storage* (JSTOR), Guy Robert Pierre, *Indonesian Journal of Global Discourse*, dan *Georgetown Journal of International Affairs*, buku milik Seth G. Jones, laporan resmi milik *World Food Programme*, *Food Security Information Network* (FSIN), *Human Rights Watch* (HRW), *World Bank*, *International Monetary Fund* (IMF), dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta media berita relevan yang telah terjamin validitasnya. Sumber data sekunder yang disebutkan telah tersedia dan dapat diakses oleh penulis. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk mengambil opsi tersebut.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian berhubungan dengan suatu individu maupun kelompok, yang diharapkan dapat memberikan informasi akurat untuk menunjang sebuah penelitian. Secara umum, subjek penelitian dapat dipahami sebagai peristiwa, manusia, situasi, yang sedang diobservasi oleh peneliti

(Lincoln, Yvonna, & Egon, 1985). Subjek penelitian yang akan disoroti pada penelitian ini adalah program *Haiti Country Strategic Plan* sebagai bentuk implementasi rezim internasional, yaitu kerangka pembangunan SDGs 2. Dengan demikian, pernyataan dari jurnal, laporan resmi *World Food Programme*, dan buku mampu menunjang poin penelitian ini.

1.8.4. Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan satu jenis data, yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersifat tidak langsung atau telah berada di pihak kedua dari sumber primer. Data sekunder dapat didefinisikan dengan sumber data yang telah ada dan digunakan, baik untuk tujuan yang awalnya tidak dimaksudkan atau oleh orang lain selain peneliti yang mengumpulkan data asli (Salkind, 2010). Fungsi dari data sekunder ini adalah sebagai data pendukung penulis pada argumen yang peneliti tulis, dan informasi data sekunder. Data sekunder ini bersumber dari literatur yang ada, seperti jurnal, buku, laporan resmi, dan media berita. Dengan demikian, jenis data sekunder mampu memperkaya data - data yang ada pada penelitian ini.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data yang menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pada bagian sumber data sekunder

akan bersumber dari jurnal, buku, laporan, media berita, dan sumber sekunder lain yang relevan dengan penelitian ini. Dengan demikian, sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis lebih mendalam dan disajikan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan satu teknik, yaitu studi kepustakaan (*desk research*). Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan juga diaplikasikan dalam melakukan penelitian ini. Secara definisi, studi kepustakaan dapat dipahami dengan mengambil jumlah data dan informasi melalui bantuan - bantuan material yang berada di perpustakaan (Moleong, 1989:82). Dalam teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, maka data yang digunakan bersumber melalui laporan resmi, kepustakaan, internet, dan arsip dokumen. Selain itu, penggunaan teknik ini berkaitan dengan adanya data sekunder yang kemudian dapat leluasa untuk menelisik data (Moleong, 1989:82). Melalui data sekunder yang telah tersedia, maka penelitian ini dapat menggunakan literatur dan data - data yang terjamin validitasnya. Dengan demikian, penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi

ke pustakaan (*desk research*), dapat membandingkan dan menelaah segala sumber kepustakaan yang tersedia.

1.8.7. Analisis dan Intrepretasi Data

Analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini memiliki sifat kualitatif. Secara umum, analisis data adalah sebuah proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis pada transkrip, catatan lapangan, dan materi yang peneliti kumpulkan untuk memungkinkan peneliti menemukan temuan (Mouw, 2022:64). Tentu analisis data menjadi hal yang penting dalam melakukan penelitian agar dapat berjalan dengan semestinya. Lebih lanjut, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Menurut John W. Creswell dan J. David Creswell (dalam Mouw, 2022:66), analisis data kualitatif dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mencari dan menyeleksi data yang bersumber dari data primer seperti hasil catatan lapangan, wawancara, dan yang bersumber dari data sekunder seperti buku dan jurnal, yang nantinya akan diolah berdasarkan beberapa tahapan serta akan disajikan dalam bentuk paragraf naratif. Lebih lanjut, adapun tujuan penelitian yang bersifat kualitatif untuk memahami bentuk data berupa tulisan dan gambar. Dengan demikian, analisis data berguna untuk menganalisis data yang telah diperoleh.



Gambar 1.3 Proses Validasi Akurasi Informasi

Sumber: Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Creswell and Creswell, 2018)

Merujuk pada gambar 1.3, terdapat tujuh tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh validasi akurasi informasi menurut John W. Creswell. Tahap satu disebutkan dalam gambar yaitu mempersiapkan data mentah sebagai dasar bahan penelitian. Data mentah ini antara lain transkrip wawancara, hasil data lapangan, materi, dan sumber informasi relevan lainnya. Tahap kedua yaitu proses para peneliti untuk menyusun dan mempersiapkan data yang bersifat mentah untuk dianalisis. Dalam proses tersebut, maka data yang dipersiapkan harus dipilah sesuai dengan fokus isu penelitian. Tahap ketiga merupakan proses membaca seluruh data, yang dimulai dengan membangun *general sense* atas informasi yang

diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Biasanya dalam tahap ini para peneliti juga diharuskan untuk menulis catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang diperoleh. Tahap keempat merupakan proses memberi kode data. Hal ini dapat diartikan sebagai proses mengorganisasikan data berupa tulisan maupun gambar yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain, proses memberi kode data ini nantinya dapat berbentuk tabel yang berisikan kode beserta isinya, menggunakan tulisan tangan atau komputer agar mudah untuk dipahami. Tahap kelima merupakan proses hasil dari memberi kode data, yang kemudian dapat menghasilkan sebuah tema dan deskripsi. Secara spesifik, kode data akan diolah menjadi deskripsi yang melibatkan usaha dalam penyampaian informasi secara spesifik mengenai pelaku, lokasi, dan peristiwa fenomena tertentu, yang nantinya akan menghasilkan sebuah tema.

Hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai interpretasi data secara kualitatif, yang perlu digunakan dalam penelitian ini. Secara umum, interpretasi data merupakan sebuah pengembangan ide tentang temuan peneliti dalam proses analisis data dan dihubungkan dengan sumber data yang dimiliki (Mouw, 2022:64). Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa analisis dan interpretasi data telah menjadi

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena penemuan dan ide penemuan berjalan beriringan (Bogdan dan Biklen, 2007:159). Lebih lanjut mengenai interpretasi data kualitatif, maka dapat dipahami sebagai pengembangan ide tentang temuan yang ada dan telah dihubungkan dengan literatur berdasarkan konsep atau teori (Bogdan dan Biklen, 2007:159). Hasil pengembangan ide yang berupa hasil analisis dari penerapan Teori Rezim Internasional akan disajikan dalam penelitian ini. Pengembangan ide melalui teori tersebut juga diaplikasikan dalam keterkaitan isu pangan, yang dapat menghasilkan efektivitas implementasi rezim internasional berupa kerangka pembangunan SDGs 2 melalui program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 – 2023. Adapun variabel yang digunakan dalam teori tersebut adalah variabel independen, dependen, dan intervening dapat diaplikasikan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, analisis yang mendukung dari adanya penerapan teori akan menjadi suatu perspektif dan temuan yang teoritis dalam penelitian ini. Dengan demikian, interpretasi data berguna untuk menyajikan hasil yang telah melewati proses analisis data.

1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Penelitian ini memiliki kualitas data yang baik karena didukung oleh sumber sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini akan bersumber dari buku, jurnal, laporan resmi, dan media berita yang telah terjamin validitasnya. Data yang kemudian dapat dihasilkan melalui sumber data sekunder, akan diolah melalui metode penelitian kualitatif. Metode penelitian tersebut menggunakan variabel yang dapat menentukan efektivitas dari sebuah kebijakan atau program. Lebih lanjut, variabel yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan dengan teori penelitian, sehingga mampu memperkuat data sekunder. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kualitas data yang empiris dan teoritis guna mengungkap dan menjelaskan efektivitas implementasi rezim internasional berupa kerangka pembangunan SDGs 2 melalui program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* dalam mengatasi krisis pangan di Haiti pada tahun 2019 – 2023

1.9. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terbagi dan tersusun dalam empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab I memuat pendahuluan yang menjadi desain riset dari penelitian ini

Bab II Implementasi Program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* Tahun 2019 - 2023

Bab II memuat deskripsi mengenai implementasi program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* tahun 2019 – 2023

Bab III Analisis Efektivitas Kerangka Pembangunan SDGs 2 Melalui Program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* Tahun 2019 - 2023

Bab III memuat analisis mengenai efektivitas rezim internasional SDGs 2 melalui implementasi program *Haiti Country Strategic Plan* oleh *World Food Programme* tahun 2019 – 2023

Bab IV Kesimpulan

Bab IV memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran - saran yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.